

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu tuntutan reformasi di Indonesia untuk menciptakan *Good Governance*, yaitu demi mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Undang-undang ini merupakan suatu regulasi yang mengatur urusan pemerintahan daerah yang dikenal dengan asas otonomi daerah. Dengan perkembangan zaman undang-undang tersebut mengalami perbaikan dan perubahan, yaitu dari mulai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Nomor 32 Tahun 2004 yang kini telah diperbaharui kembali dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam otonomi daerah terdapat asas desentralisasi, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 8 desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Yustisia, 2015:23).

Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Implikasi dari kebijakan otonomi daerah tersebut memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dan kepentingan pemerintah daerahnya masing-masing. Kemudian pelaksanaan otonomi daerah ini juga dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota yang dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerahnya secara proporsional (Mardiasmo, 2002:8).

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Warsito dkk, 2011:45).

Pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah didasarkan pada empat prinsip, yaitu urusan yang merupakan tugas pemerintah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai atas APBN, urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya yang dilaksanakan dalam tugas pembantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD sebagai pihak yang menugaskan dan sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan (Mudrajad, 2004:7).

Sesuai kriteria opini BPK, Laporan keuangan disajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dalam hal yang material, posisi keuangan Pemerintah daerah mulai dari realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional,

arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kemudian jika Laporan disajikan secara Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dalam hal yang material, pemerintah daerah telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Piutang Pajak, Piutang Sewa Tanah, Persediaan, Aset Tetap, Utang dan Beban, namun belum dilaksanakan secara memadai. Jadi, BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedianya data dan informasi pada satuan kerja perangkat daerah terkait. BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap penyajian saldo-saldo tersebut. Dan jika Laporan keuangan disajikan dengan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *disclaimer* artinya auditor dibatasi geraknya, tak bisa mengumpulkan bukti audit dalam hal material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan.

Di Kota Bandung selama lima tahun terakhir ini masih diberi opini wajar dengan pengecualian oleh BPK. Ini berdasarkan data yang diperoleh dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012-2016

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2012	Opini Tahun 2013	Opini Tahun 2014	Opini Tahun 2015	Opini Tahun 2016
1.	Prov. Jabar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kab. Bandung	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP
3.	Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
4.	Kab. Bekasi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
5.	Kab. Bogor	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
6.	Kab. Ciamis	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kab. Cianjur	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
8.	Kab. Cirebon	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
9.	Kab. Garut	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
10.	Kab. Indramayu	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP
11.	Kab. Karawang	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
12.	Kab. Kuningan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
13.	Kab. Majalengka	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	Kab. Pangandaran			WDP	WDP	WTP
15.	Kab. Purwakarta	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
16.	Kab. Subang	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
17.	Kab. Sukabumi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
18.	Kab. Sumedang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
19.	Kab. Tasikmalaya	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
20.	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
21.	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	Kota Bekasi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
23.	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
24.	Kota Cimahi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	Kota Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
26.	Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	Kota Sukabumi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
28.	Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber: IHPS I Tahun 2017, BPK RI (diolah).

Keterangan

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Dari tabel diatas bahwa hasil pemeriksaan tahun 2012-2016 untuk laporan keuangan Pemkot Bandung masih diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian

(WDP) yakni ada sejumlah temuan yang perlu mendapat perhatian dari beberapa pemda diantaranya pembukaan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah dan atau BUD, aset tetap tanah yang dimiliki pemda yang masih belum bersertifikat, serta sertifikat tanah fasilitas sosial fasilitas umum yang belum diserahkan kepada pemda setempat (BPK RI, TA 2012-2016). Ada beberapa hal yang dinilai masih cukup material untuk dijadikan sebagai pengecualian dalam opini BPK terhadap laporan keuangan daerah kota Bandung. Jadi kota Bandung harus lebih diperhatikan dan diperbaiki sistem laporan keuangannya kembali.

Kemudian pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD pemerintahan daerah. SKPD yang melakukan pengelolaan keuangan daerah di Kota Bandung adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dan juga sebagai bendahara umum daerah (BUD).

Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai kewajiban daerah yang diwujudkan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Berdasarkan yang dilakukan oleh peneliti di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan belanja daerah. Untuk belanja daerah, pada setiap tahunnya memiliki presentase realisasi yang fluktuatif.

Hal ini sesuai data dari BPKAD mengenai target dan realisasi belanja daerah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016.

Tabel 1.2
Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2012	3.864.669.570.886,63	3.490.035.513.075,00	90,31
2013	4.755.244.946.717,15	4.027.469.180.321,00	84,70
2014	5.717.545.328.505,00	4.435.589.826.032,00	77,58
2015	6.553.368.797.049,00	5.201.938.207.165,00	79,38
2016	7.359.848.469.022,00	5.829.512.978.424,00	79,21

Sumber: LKPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 (diolah).

Berdasarkan tabel 1.2 target dan realisasi belanja daerah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016, diketahui pada tahun 2012 Kota Bandung merealisasikan belanja daerah sebesar 3.490.035.513.075,00, hal itu belum mencapai target belanja daerah sebesar 3.864.669.570.886,63. Pada tahun 2013 Kota Bandung merealisasikan belanja daerah sebesar 4.027.469.180.321,00, hal itu belum mencapai target belanja daerah sebesar 4.755.244.946.717,15. Pada tahun 2014 Kota Bandung merealisasikan belanja daerah sebesar 4.435.589.826.032,00, hal itu belum mencapai target belanja daerah sebesar 5.717.545.328.505,00. Pada tahun 2015 Kota Bandung merealisasikan belanja daerah sebesar 5.201.938.207.165,00, hal itu belum mencapai target belanja

daerah sebesar 6.553.368.797.049,00. Pada tahun 2016 Kota Bandung merealisasikan belanja daerah sebesar 5.829.512.978.424,00, hal itu belum mencapai target belanja daerah sebesar 7.359.848.469.022,00. Realisasi anggaran tahun 2012-2016 mengalami penurunan tiap tahunnya terhadap pencapaian target anggaran. Realisasi anggaran merupakan tolak ukur kinerja keuangan suatu instansi atau lelabag. Apabila realisasi anggaran tidak mencapai target maka kinerja keuangan suatu daerah tidak dapat mengelolanya dengan baik.

Tabel 1.3
Belanja Langsung
Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2012	1.696.939.175.965,33	1.383.085.288.309,00	81,50
2013	2.389.049.473.401,00	1.911.473.775.634,00	80,00
2014	3.014.489.965.941,00	2.095.559.367.125,00	69,51
2015	3.769.110.380.336,00	2.818.307.902.431,00	74,77
2016	4.426.415.089.655,00	3.274.318.478.243,00	73,97

Sumber: LKPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 (diolah).

Berdasarkan tabel 1.3 target dan realisasi belanja langsung di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016, diketahui pada tahun 2012 Kota Bandung merealisasikan belanja daerah sebesar 1.383.085.288.309,00, hal itu belum mencapai target belanja daerah sebesar 1.696.939.175.965,33. Pada tahun 2013 Kota Bandung merealisasikan belanja daerah sebesar 1.911.473.775.634,00, hal

itu belum mencapai target belanja daerah sebesar 2.389.049.473.401,00. Pada tahun 2014 Kota Bandung merealisasikan belanja daerah sebesar 2.095.559.367.125,00, hal itu belum mencapai target belanja daerah sebesar 3.014.489.965.941,00. Pada tahun 2015 Kota Bandung merealisasikan belanja daerah sebesar 2.818.307.902.431,00, hal itu belum mencapai target belanja daerah sebesar 3.769.110.380.336,00. Pada tahun 2016 Kota Bandung merealisasikan belanja daerah sebesar 3.274.318.478.243,00, hal itu belum mencapai target belanja daerah sebesar 4.426.415.089.655,00. Realisasi anggaran tahun 2012-2016 mengalami penurunan tiap tahunnya terhadap pencapaian target anggaran. Didalam penganggaran belanja langsung yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan juga mengalami penurunan tiap tahun anggaran.

Tabel 1.4
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2012	3.609.909.735.354,63	3.666.693.409.600,00	101,57
2013	4.349.877.954.232,15	4.332.088.946.776,00	99,59
2014	5.302.471.398.707,15	4.953.940.629.444,00	93,43
2015	5.455.361.616.094,00	5.098.071.916.848,00	93,45
2016	6.684.129.617.384,00	5.685.213.859.929,00	85,06

Sumber: LKPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 (diolah).

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan daerah pada pemerintah Kota Bandung selama lima tahun terakhir ini selalu berada dibawah target anggaran minimal. Dari data diatas realisasi pendapatan daerah yang berada di atas target anggaran hanya pada Tahun 2012 sebesar 101,57%. Sedangkan Tahun 2013 sebesar 99,59 %, Tahun 2014 93,43%, Tahun 2015 93,45%, dan Tahun 2016 sebesar 85%. Artinya pendapatan daerah tidak tercapai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah harus memberdayakan daerahnya sendiri. Untuk itu diperlukan kewenangan dan kemampuan mendapatkan penerimaan sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan sendiri, yaitu dengan cara meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, baik dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah maupun dengan penggalian sumber pendapatan Asli daerah yang baru dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten dan kota dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dapat dilihat pada tabel 1.3 mengenai Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2012	933.920.994.572,00	1.005.583.424.429,00	107,67
2013	1.407.759.106.133,00	1.442.775.238.323,00	102,49
2014	1.808.509.055.075,00	1.716.057.298.378,00	94,89
2015	2.066.246.830.526,00	1.859.694.643.505,00	90,00
2016	2.767.404.903.364,00	2.152.755.704.962,00	77,79

Sumber: LKPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 (diolah).

Berdasarkan tabel 1.5 terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 mengalami penurunan. Dari data diatas realisasi pendapatan asli daerah berada di antara target minimal dan maksimal pada Tahun 2012 sebesar 107,67% dan tahun 2013 sebesar 102,49% artinya pendapatan asli daerah tercapai. Sedangkan Tahun 2014 sebesar 94,89%, Tahun 2015 sebesar 90% dan Tahun 2016 sebesar 77,79% realisasi pendapatan asli daerah tidak tercapai. Ini menunjukkan bahwa Kota Bandung dapat dikatakan sebagai kota yang mandiri pada tahun 2012-2013 sehingga mengurangi ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat. Sedangkan tahun 2014-2016 mengalami sebaliknya, realisasi anggaran pendapatan

mengalami penurunan dari anggaran pendapatan yang ditransfer dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam bentuk penerimaan PAD masih belum dapat terpenuhi. Ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam bentuk transfer menggambarkan bahwa daerah belum mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan di daerahnya.

Tabel 1.6

**Realisasi Anggaran Pajak Daerah
Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2012	727.000.000.000,00	820.563.651.111,00	112,87
2013	1.063.000.000.000,00	1.194.087.447.016,00	112,33
2014	1.400.000.000.000,00	1.399.596.856.917,00	99,97
2015	1.598.000.000.000,00	1.494.147.377.053,00	93,50
2016	2.186.416.770.000,00	1.709.807.582.556,00	78,20

Sumber: LKPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 (diolah).

Berdasarkan tabel 1.6 terlihat bahwa realisasi Pajak Daerah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 mengalami penurunan. Dari data diatas realisasi pendapatan asli daerah berada di antara target minimal dan maksimal pada Tahun 2012 sebesar 107,67% dan tahun 2013 sebesar 102,49% artinya realisasi pajak daerah tercapai. Sedangkan Tahun 2014 sebesar 99,97%, Tahun 2015 sebesar 93,50% dan Tahun 2016 sebesar 78,20% realisasi pendapatan asli daerah tidak tercapai.

Tabel 1.7
Realisasi Anggaran Retribusi Daerah
Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2012	71.174.028.328,00	78.649.880.372,00	110,50
2013	100.816.228.425,00	115.508.351.284,00	114,57
2014	131.157.749.867,00	99.192.319.387,00	75,83
2015	107.563.238.797,00	64.985.847.830,00	60,42
2016	204.770.058.000,00	92.0066.779.460,00	44,93

Sumber: LKPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 (diolah).

Berdasarkan tabel 1.7 terlihat bahwa realisasi Retribusi Daerah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 mengalami penurunan. Dari data diatas realisasi retribusi daerah berada di antara target minimal dan maksimal pada Tahun 2012 sebesar 110,50% dan tahun 2013 sebesar 114,57% artinya realisasi pajak daerah tercapai. Sedangkan Tahun 2014 sebesar 75,83%, Tahun 2015 sebesar 60,42% dan Tahun 2016 sebesar 44,93% realisasi pendapatan asli daerah tidak tercapai:

Tabel 1.8
Realisasi Anggaran Pendapatan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2012	10.269.067.395,00	7.227.067.446,00	70,38
2013	19.157.551.445,00	12.069.972.667,00	63,00
2014	19.157.551.445,00	9.356.757.469,00	48,84
2015	20.000.000.000,00	8.602.757.430,00	43,01
2016	20.000.000.000,00	10.658.411.624,00	53,29

Sumber: LKPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 (diolah).

Berdasarkan tabel 1.8 terlihat bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 mengalami penurunan. Dari data diatas realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berada di pada Tahun 2012 sebesar 70,38%, Tahun 2013 sebesar 63,00%, Tahun 2014 sebesar 48,84%, Tahun 2015 sebesar 43,01% dan Tahun 2016 sebesar 53,29% realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak tercapai.

Tabel 1.9
Realisasi Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2012	125.447.898.849,00	99.142.825.500,00	79,01
2013	224.785.326.263,00	121.109.467.356,00	53,88
2014	258.193.763.763,00	207.909.364.605,00	80,52
2015	340.683.591.729,00	291.9558.661.192,00	85,70
2016	356.218.075.364,00	340.282.931.322,00	95,53

Sumber: LKPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 (diolah).

Berdasarkan tabel 1.9 terlihat bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 mengalami penurunan. Dari data diatas realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berada di pada Tahun 2012 sebesar 79,01%, Tahun 2013 sebesar 53,88%, Tahun 2014 sebesar 80,52%, Tahun 2015 sebesar 85,70% dan Tahun 2016 sebesar 95,53% realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak tercapai.

Tuntutan dari otonomi daerah yakni setiap daerah otonom harus dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan konsep *good governance*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016**”.

1.2 Identifikasi Masalah

- 1.2.1 Ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Pemerintah Pusat masih cukup besar.
- 1.2.2 Masih rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dari nilai total pendapatan daerah .
- 1.2.3 Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama tiga tahun terakhir tidak mencapai target, yaitu pada Tahun 2014 sebesar 94,89%, Tahun 2015 sebesar 90% dan Tahun 2016 sebesar 77,79%.
- 1.2.4 Realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 mengalami penurunan. Dari data diatas realisasi pendapatan asli daerah berada di antara target minimal dan maksimal pada Tahun 2012 sebesar 107,67% dan tahun 2013 sebesar 102,49% artinya realisasi pajak daerah tercapai. Sedangkan Tahun 2014 sebesar 99,97%, Tahun 2015 sebesar 93,50% dan Tahun 2016 sebesar 78,20% realisasi pendapatan asli daerah tidak tercapai.
- 1.2.5 Realisasi penerimaan Retribusi Daerah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 mengalami penurunan. Dari data diatas realisasi retribusi daerah berada di antara target minimal dan maksimal pada Tahun 2012 sebesar 110,50% dan tahun 2013 sebesar 114,57% artinya realisasi pajak

daerah tercapai. Sedangkan Tahun 2014 sebesar 75,83%, Tahun 2015 sebesar 60,42% dan Tahun 2016 sebesar 44,93% realisasi pendapatan asli daerah tidak tercapai.

1.2.6 Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 mengalami penurunan. Dari data diatas realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berada di pada Tahun 2012 sebesar 70,38%, Tahun 2013 sebesar 63,00%, Tahun 2014 sebesar 48,84%, Tahun 2015 sebesar 43,01% dan Tahun 2016 sebesar 53,29% realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak tercapai.

1.2.7 Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 mengalami penurunan. Dari data diatas realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berada di pada Tahun 2012 sebesar 79,01%, Tahun 2013 sebesar 53,88%, Tahun 2014 sebesar 80,52%, Tahun 2015 sebesar 85,70% dan Tahun 2016 sebesar 95,53% realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak tercapai.

1.2.8 Masih rendahnya target dan realisasi belanja langsung di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016, diketahui pada tahun 2012 Kota Bandung merealisasikan belanja daerah sebesar 1.383.085.288.309,00, hal itu belum mencapai target belanja daerah sebesar 1.696.939.175.965,33. Pada tahun 2013 Kota Bandung merealisasikan belanja daerah sebesar 1.911.473.775.634,00, hal itu belum mencapai target belanja daerah

sebesar 2.389.049.473.401,00. Pada tahun 2014 Kota Bandung merealisasikan belanja daerah sebesar 2.095.559.367.125,00, hal itu belum mencapai target belanja daerah sebesar 3.014.489.965.941,00. Pada tahun 2015 Kota Bandung merealisasikan belanja daerah sebesar 2.818.307.902.431,00, hal itu belum mencapai target belanja daerah sebesar 3.769.110.380.336,00. Pada tahun 2016 Kota Bandung merealisasikan belanja daerah sebesar 3.274.318.478.243,00, hal itu belum mencapai target belanja daerah sebesar 4.426.415.089.655,00. Realisasi anggaran tahun 2012-2016 mengalami penurunan tiap tahunnya terhadap pencapaian target anggaran.

1.3 Rumusan Masalah

Melihat dari permasalahan atau fenomena yang ada perlu adanya penelitian mengenai kondisi keuangan daerah. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Seberapa besar pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap belanja langsung di Kota Bandung ?
- 1.3.2 Seberapa besar pengaruh pendapatan retribusi daerah terhadap belanja langsung di Kota Bandung?
- 1.3.3 Seberapa besar pengaruh pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja langsung di Kota Bandung?
- 1.3.4 Seberapa besar pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja langsung di Kota Bandung?

- 1.3.5 Seberapa besar pengaruh pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara simultan terhadap belanja langsung di Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap belanja langsung di Kota Bandung.
- 1.4.2 Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan retribusi daerah terhadap belanja langsung di Kota Bandung.
- 1.4.3 Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja langsung di Kota Bandung.
- 1.4.4 Untuk mengetahui besarnya pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja langsung di Kota Bandung.
- 1.4.5 Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara simultan terhadap belanja langsung di Kota Bandung

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan ilmu yang berguna sebagai rujukan, referensi dan menjadi bahan informasi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian khususnya mengenai pendapatan asli daerah dan belanja daerah pada pemerintah Kota Bandung.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai suatu kegiatan yang bermanfaat dalam menambah wawasan keilmuan serta mengembangkan keilmuan dibidang pemerintahan, khususnya mengenai pendapatan asli daerah dan belanja daerah pada pemerintah Kota Bandung.

2. Bagi Pemerintah Kota Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi kearah yang lebih baik serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menganalisis pendapatan asli daerah dan belanja daerah pada pemerintah Kota Bandung.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau bahan acuan untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti pendapatan asli daerah dan belanja daerah pada pemerintah Kota Bandung.

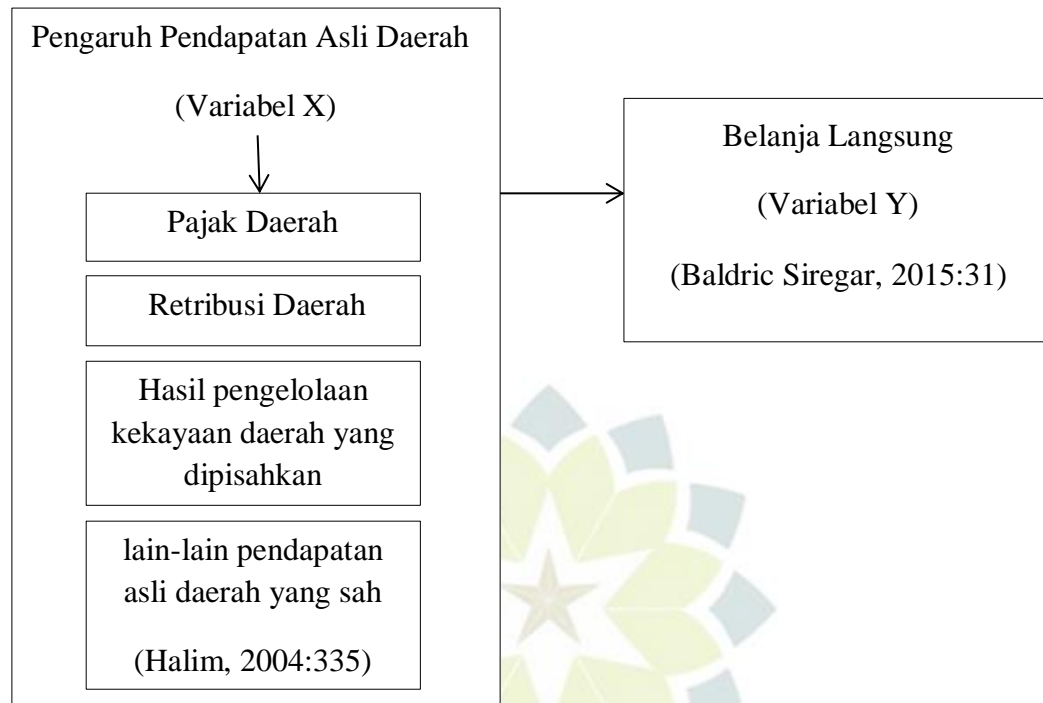
1.6 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam otonomi daerah terdapat asas desentralisasi, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 8 desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Yustisia, 2015:23).

Menurut (Halim, 2004:94) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD pemerintahan daerah. SKPD yang melakukan pengelolaan keuangan daerah di Kota Bandung adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dan juga sebagai bendahara umum daerah (BUD).

Berdasarkan uraian diatas, maka yang akan menjadi model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran



1.7 Hipotesis

Hipotesis (Sugiyono, 2016:70) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.

Dapat penulis simpulkan bahwa hipotesis yaitu jawaban sementara dan masih harus diuji kebenarannya melalui penelitian yang lebih lanjut, dan berdasarkan acuan dari pemikiran diatas penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Ho : Tidak terdapat pengaruh parsial pajak daerah terhadap belanja langsung di Kota Bandung.
Ha : Terdapat pengaruh parsial pajak daerah terhadap belanja langsung di Kota Bandung.
2. Ho : Tidak terdapat pengaruh parsial retribusi daerah terhadap belanja langsung di Kota Bandung.
Ha : Terdapat pengaruh parsial retribusi daerah terhadap belanja langsung di Kota Bandung.
3. Ho : Tidak terdapat pengaruh parsial hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja langsung di Kota Bandung.
Ha : Terdapat pengaruh parsial hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja langsung di Kota Bandung.
4. Ho : Tidak terdapat pengaruh parsial lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja langsung di Kota Bandung
Ha : Terdapat pengaruh parsial lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja langsung di Kota Bandung
5. Ho : Tidak terdapat pengaruh simultan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja langsung di Kota Bandung
Ha : Terdapat pengaruh simultan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja langsung di Kota Bandung

